

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik lembaga *rechtsverwerking* dalam penguasaan tanah adat berdasarkan hukum agraria nasional dan *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung Nomor 2044 K/Pdt/2015 terhadap eksistensi lembaga *rechtsverwerking*. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian hukum ini ditemukan bahwa karakteristik lembaga *rechtsverwerking* dalam penguasaan tanah adat telah diakui keberadaannya dalam sistem hukum agraria nasional. Hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan agraria nasional. Kemudian, amar putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2044 K/Pdt/2015 telah tepat, sebagaimana memperkuat putusan tahap banding di Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PDT/2015/PT.SBY, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 12 /Pdt.G/2014/PN.Gsk. Akan tetapi, pada *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, terdapat kekurangan, yaitu dengan menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan, bukan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait lembaga *rechtsverwerking* yang telah jelas diatur eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan nasional dan mempunyai kedudukan lebih diutamakan dalam sumber hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Lembaga *Rechtsverwerking*, Hukum Agraria, Tanah Adat, Penguasaan Tanah.

**ABSTRACT**

*This research aims to determine and analyze the characteristics of rechtsverwerking institutions in the control of customary land based on national agrarian law and the ratio of decidendi to the decision of the Supreme Court Number 2044 K / Pdt / 2015 on the existence of rechtsverwerking institutions. The type of research used are normative legal research using the problem approach, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. In this legal research was found that the characteristics of rechtsverwerking institutions in the control of customary land have been recognized in the national agrarian legal system. This can be found in various national agrarian laws and regulations. Then, the decision of the panel of judges in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2044 K / Pdt / 2015 was correct, as it strengthened the decision of the appeal stage in the Surabaya High Court Number 15 / PDT / 2015 / PT.SBY, which canceled the Gresik District Court Decision Number 12 /Pdt.G/2014/PN.Gsk. However, in the decidendi ratio of the Decision of the Supreme Court and the Decision of the Surabaya High Court, there are shortcomings, namely by using jurisprudence as a basis for consideration, not using legislation related to rechtsverwerking institutions that have clearly regulated their existence in national regulations and has a priority in the source of Indonesian law.*

**Key Words:** *Rechtsverwerking Institution, Agrarian Law, Customary Land, Land Tenure.*